

Judul : Nostal-Gie
Tanggal : Senin, 11 April 2022
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 3

S P E K T R U M

Nostal-Gie

Tegar Arief
tegar.arief@bisnis.com



Hari ini, ribuan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa serempak untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, dengan berbagai isu yang disuarakan. Di antaranya menjamin stabilitas harga bahan pokok, evaluasi kinerja pemerintah, pencabutan UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, hingga tuntutan sumir perihal penundaan Pemilu 2024 dan pengantulan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Saya katakan sumir karena dua isu terakhir telah mendapat pencerahan. Presiden Joko Widodo memastikan tetap menggelar pemilu pada 14 Februari 2024, alias tidak ada penundaan. Adapun, mengenai UU Cipta Kerja telah dilaksanakan amanah Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah untuk mendesain ulang regulasi.

Tidak salah apabila para agen perubahan melaksanakan perannya melalui parlemen jalanan. Toh itu legal dan sah selama mengikuti peraturan yang berlaku. Setidaknya, aksi ini menunjukkan mahasiswa masih memiliki sikap kritis dan pisau analisis yang tajam.

Berbicara tentang aksi mahasiswa, tidak mudah melepaskan nostalgia. Sejarah mencatat gerakan mahasiswa banyak melahirkan perubahan fundamental. Demonstrasi 1998 salah satunya. Krisis moneter 1997 memicu mahasiswa melakukan aksi yang mendorong Presiden Soeharto mundur.

Terlepas berbagai dinamika, kekerasan, hingga penculikan sejumlah aktivitas, aksi tersebut berjalan efektif sehingga terjadi pergantian rezim dari Orde Baru ke Reformasi.

Jauh sebelum itu, gerakan mahasiswa juga telah menunjukkan hasil tatkala Soe Hok Gie dan sekawanannya dari berbagai elemen melakukan aksi pada 1966 untuk mem-

protes kepemimpinan Presiden Sukarno.

Demonstrasi legendaris itu mengusung tiga tuntutan rakyat (Tritura) yakni pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan menurunkan harga pangan. Aksi ini juga menjadi salah satu peletup mundurnya Sukarno.

Harus diakui, aktivis 66 mampu menanam benih di benak mahasiswa untuk selalu melakukan orkestrasi jalanan. Apalagi, dengan kecanggihan teknologi yang mampu membawa informasi hingga ke penjuru negeri, hampir tidak ada isu atau gagasan yang tak terdistribusi dalam setiap aksi. Inilah yang menjadi keuntungan dari agen perubahan di era digitalisasi.

Namun, tantangan mahasiswa pun tidak bisa dibilang enteng. Para agen wajib memilah isu yang lebih urgen, tentunya dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebagai pihak yang diwakili. Apabila isu yang diusung masih sumir, janganakan terealisasi, untuk didengar oleh pemangku kebijakan pun rasanya hampir tidak mungkin. Misalnya, soal penundaan pemilu dan UU Cipta Kerja.

Argumentasi yang disampaikan Presiden soal pemilu, serta putusan MK diiringi langkah pemerintah dan DPR untuk mendesain ulang UU Cipta Kerja perlu menjadi catatan. Alhasil, dua isu ini tak lagi relevan untuk disuarakan.

Singkat kata, sikap kritis dan pisau analisis dewasa ini tak cukup mampu menjadi senjata mahasiswa untuk mewujudkan perubahan. Lebih dari itu, perlu ada kepekaan mengenai urgensi dari isu yang diusung sehingga tetap relevan untuk disuarakan.

Seperti kata Gie, *"masih terlalu banyak mahasiswa yang bermental sok kuasa. Merintih kalau ditekan, tetapi menindas kalau berkuasa. Mementingkan golongan, ormas, teman seideologi dan lain-lain."*